

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Chidir, Badan Hukum, (Bandung, Alumni, 1999)
- Dja'is, Mochamad dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR,
(Semarang : Percetakan Oetama-Semarang, 2010)
- Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : PT.Citra
Aditya Bakti, 2003)
- Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2009)
- Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-
Undangan, dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Total Media, 2008)
- _____, Hukum Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014)
- Shubhan, Hadi, S.H., M.H., C.N., Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan
Praktik di Peradilan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta : Grafiti, 2008)
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum dan Masyarakat, (Jakarta : Rajawali,
1982)
- _____, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Ringkas, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persadar, 2001)
- Widijowati, Dijan, Hukum Dagang, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012)

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) S.1905-217 jo.S.1906-348

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan
Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

c. Putusan Kepailitan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/2012/P.N.Smg

d. Lainnya

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008)